

SKRIPSI

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH
DI BIDANG KESEHATAN DAN PENDIDIKAN
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI
DI KABUPATEN MAROS**

disusun dan diajukan oleh:

**ASNURYATI
A011171009**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH
DI BIDANG KESEHATAN DAN PENDIDIKAN
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI
DI KABUPATEN MAROS**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh:

**ASNURYATI
A011171009**



kepada

**DEPARTEMEN STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

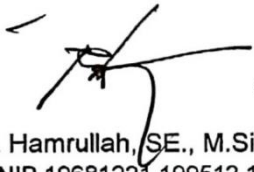
**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI BIDANG KESEHATAN DAN
PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI
PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN MAROS**

disusun dan diajukan oleh

**ASNURYATI
A011171009**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Makassar, 02 Juli 2024

Pembimbing Utama



**Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF
NIP.19681221 199512 1 001**


Pembimbing Pendamping



**Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si.,CSF
NIP. 195903031988101001**

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




**Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®.
NIP. 197407152002121003**

SKRIPSI

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI BIDANG KESEHATAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN MAROS

disusun dan diajukan oleh

ASNURYATI

A011171009

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **02 Juli 2024**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Hamrullah, SE., M.Si.,CSF	Ketua	1.
2.	Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si.,CSF	Sekretaris	2.
3.	Dr. Sabir, SE.,M.Si.CWM®	Anggota	3.
4.	Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M. Si., CWM	Anggota	4.

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®
NIP. 197407152002121003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : ASNURYATI

Nomor Pokok : A011171009

Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Maros” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 01 Juli 2024

Yang Menyatakan



ASNURYATI

A011171009

PRAKATA

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa langit dan bumi beserta isinya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada setiap manusia yang dikehendaki-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu 'Alaihi wa Sallam, suri teladan terbaik bagi umat manusia, juga kepada keluarga serta sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya.

Skripsi dengan judul "**Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros**" disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan dari peneliti. Dalam proses penulisan skripsi ini, peneliti banyak mendapat dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tersayang dan tercinta, untuk (Alm) Ayahanda Muhammad. As'ad Nappase, S. E dan Ibunda Nursia Ahmad, yang telah banyak mendidik, membesarkan, dan mendoakan peneliti dengan penuh kasih sayang. Kepada saudaraku Muh. Asri Amanda dan Ariel Aprizal Kemas yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama peneliti menyusun skripsi ini. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan

lahiriah maupun bathiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindunganNya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM., CWM., CRA., CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM,. selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Ibu Dr. Fitriwati, SE.,M.Si. selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Terima kasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan hingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
4. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Bapak Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si., CSF, selaku dosen pembimbing II. Terima kasih atas arahan, bimbingan, saran dan waktu yang telah diberikan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan bapak dosen pembimbing.
5. Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF, selaku penasihat akademik atas segala bantuan baik berupa arahan dan motivasi serta bimbingannya selama penulis menjalankan studi di Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Dr. Sabir, SE.,M.Si., CWM, dan Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M. Si., CWM, selaku dosen penguji. Terima kasih atas segala saran,

masukannya, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta nasihat kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
8. Ucapan terima kasih kepada Pegawai Departemen Ilmu Ekonomi. Pak Askhar dan Ibu Dama yang memberikan dukungan dan sangat membantu penulis hingga akhirnya bisa ujian.
9. Kepada yang tersayang Fardiansyah dan Muhammad Faas Alfarizqi yang selalu setia mendukung penulis dalam suka maupun duka.
10. Sahabat-sahabatku Ceribel yaitu: Indah Mahsunatul Wardah, Nurul Fadilla Burhanuddin, Nur Eka Fitriani Said, Ulsifah Islamia Ashary, Wafiqah Ulya, Indah Eka Safitri, Desi Rasari, Ita Dahlia, dan Siti Irmawati Aris. Terima kasih sahabat-sahabatku hingga saat ini telah memberikan segenap bantuan baik itu arahan serta pemikiran yang sangat membantu peneliti serta terima kasih telah menemani saat suka maupun duka selama kurang lebih 5 tahun terakhir.
11. Teman-teman Angkatan 2017 ERUDITE yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam bentuk apapun pada penulisan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat POLA ku yaitu Novita Ardya Indawati, S.E dan Intan Wulan Khairunnisa A.Md.Kep, terimakasih dari SMA hingga sekarang senantiasa menemani penulis dan mendukung penuh penulis menyelesaikan tugas akhir.
13. Dan tentunya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan motivasi serta doa sehingga atas izin Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Akhir kata, penulis ucapkan Alhamdulillah Robbil A'lammin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 01 Juli 2024

ASNURYATI

ABSTRAK

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros

Asnuryati
Hamrullah
Bakhtiar Mustari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Maros. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan, pertumbuhan ekonomi, serta indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2022, yang bersumber dari laporan BPS Kabupaten Maros. Metode analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda *Two Stage Least Square* (TSLS).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah di bidang Kesehatan mempunyai pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia baik langsung maupun tidak langsung melalui Pertumbuhan Ekonomi. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan mempunyai pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia baik langsung maupun tidak langsung melalui Pertumbuhan Ekonomi.

Kata Kunci: pengeluaran, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia

ABSTRACT

The Influence of Government Expenditures in the Health and Education Sectors on the Human Development Index through Economic Growth in Maros Regency

*Asnuryati
Hamrullah
Bakhtiar Mustari*

This research aims to determine the effect of government expenditures in the health and education sectors on the human development index through economic growth in Maros Regency. The data used in this research is secondary data covering government expenditure in the fields of health and education, economic growth, and the human development index for the period 2008 to 2022, sourced from the Maros Regency BPS report. The data analysis method used is Two Stage Least Square (TSLS) multiple linear regression.

The results of this research show that Government Expenditures in the Health sector have a positive influence on the Human Development Index both directly and indirectly through Economic Growth. Government spending in the education sector has a negative influence on the Human Development Index both directly and indirectly through Economic Growth.

Keywords: *expenditure, economic growth, human development index*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Kerangka Teori.....	13
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	13
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	17
2.1.3 Pengeluaran Pemerintah	19
2.2 Hubungan Antar Variabel	22
2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah di bidang Kesehatan dengan Indeks Pembangunan Manusia	22
2.2.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah di bidang Pendidikan dengan Indeks Pembangunan Manusia	24
2.2.3 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia.....	26
2.3 Penelitian Terdahulu.....	28
2.4 Kerangka Pemikiran	30
2.5 Hipotesis Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33

3.1 Ruang Lingkup Penelitian	33
3.2 Jenis dan Sumber Data	33
3.3 Metode Pengumpulan Data	33
3.4 Metode Analisis Data.....	33
3.5 Definisi Operasional.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Maros	39
4.1.2 Kondisi Demografi	40
4.2 Hasil Analisis Penelitian.....	41
4.2.1 Deskripsi Variabel.....	41
4.2.2 Pengujian Hipotesis.....	42
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	51
4.3.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia....	51
4.3.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia ...	53
4.3.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	55
4.3.4 Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi	56
4.3.5 Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi	58
BAB V PENUTUP	60
5.1 Simpulan	60
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1 : Luas Wilayah Kabupaten Maros.....	40
Tabel 4.2 : Deskripsi Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan dan Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia.....	42
Tabel 4.3 : Hasil Uji t (Parsial) pada Persamaan I.....	43
Tabel 4.4 : Hasil Uji F (Simultan) pada Persamaan I.....	44
Tabel 4.5 : Hasil Uji Koefisien Determinasi pada Persamaan I.....	45
Tabel 4.6 : Tabel 4.6 Hasil Uji t (Parsial) pada Persamaan II	45
Tabel 4.7 : Hasil Uji F (Simultan) pada Persamaan II.....	47
Tabel 4.8 : Hasil Uji Koefisien Determinasi pada Persamaan II.....	48
Tabel 4.9 : Hasil Estimasi Koefisien Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Antar Variabel.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 : Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2022.....	4
Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 4.1 : Peta Administrasi Kabupaten Maros	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Suatu negara dikatakan maju bukan dihitung dari pendapatan domestik bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup, tingkat kesehatan serta pendidikan masyarakatnya. Secara konsep, pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak, yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Ketika masyarakat telah memiliki keahlian maka produktifitas mereka akan lebih meningkat, di saat itulah masyarakat akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang efektif (Laisina et al., 2015).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang tercermin dalam peningkatan GDP, dapat memberikan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan faktor-faktor yang berkontribusi pada peningkatan IPM. Misalnya, dengan lebih banyak sumber daya yang tersedia, pemerintah dapat menginvestasikan pendapatan yang dihasilkan dari pertumbuhan ekonomi ke dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang dapat meningkatkan IPM. Pertumbuhan GDP yang tinggi biasanya diiringi oleh peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan dapat berkontribusi pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan gizi yang lebih baik. Ini dapat berdampak positif pada IPM, terutama dalam dimensi taraf hidup yang layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah.

Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia melalui tiga indikator utama yaitu ekonomi, pendidikan dan kesehatan (Hardana et al., 2022). Oleh karena itu, *United Nations Development Programme* (UNDP) membentuk indikator bernama *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak pengukuran IPM diberlakukan, orientasi pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih kepada manusia sebagai elemen dasar untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. UNDP menyusun suatu indeks komposit yaitu IPM berdasarkan tiga indikator: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf penduduk dewasa (*adult literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*) (Jasasila, 2020).

Indeks Pembangunan Manusia dapat dikatakan sebagai suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan (UNDP, 2018). Pada dasarnya tujuan dari pembangunan ini yaitu dengan memperbanyak pilihan kepada penduduk dimana pilihan-pilihan ini tidak terbatas dan dapat berubah kapan saja, sehingga penduduk bisa memperoleh akses yang lebih besar terhadap pengetahuan dan pendidikan, pelayanan kesehatan yang lebih baik, dan mata pencaharian yang aman dan sebagainya (Ismail et al., 2021). Tujuan akhir dari pembangunan ini juga bisa dikatakan untuk menciptakan lingkungan yang dapat memungkinkan masyarakat hidup dengan aman dan nyaman, sehat dan kreatif.

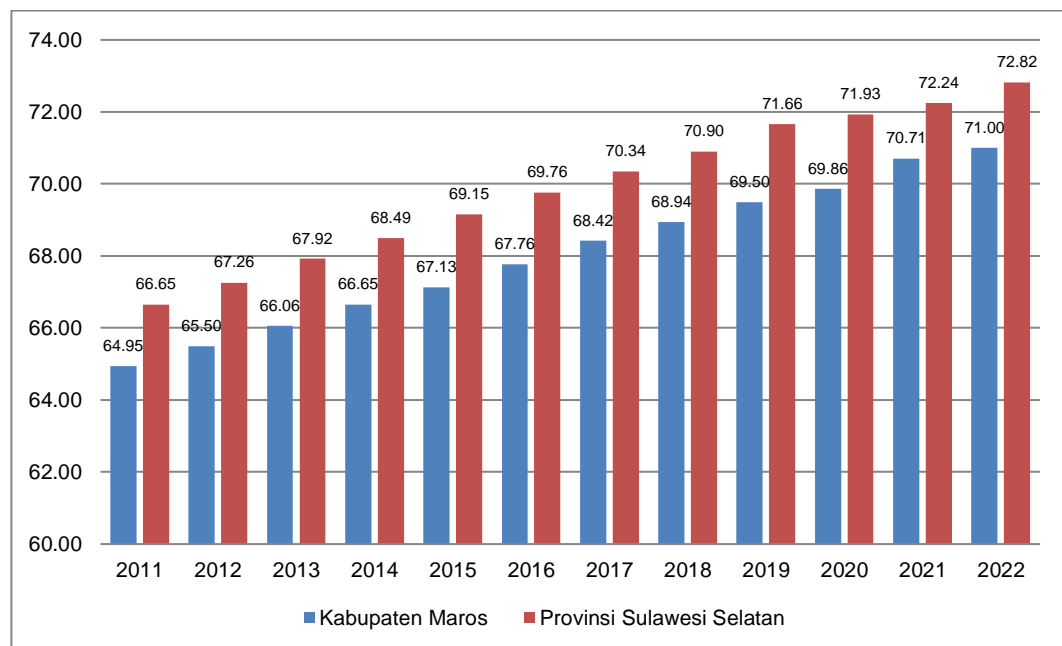
Indonesia mempunyai nilai yang kurang memuaskan terkait peringkat IPM di dunia. Berdasarkan klasifikasi UNDP (*United Nation Development Program*), Indonesia masuk sebagai negara dengan kategori Nilai Pembangunan Menengah dan menempati peringkat 113 di dunia pada tahun 2015. Hal ini tentu cukup mengawatirkan karena Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia dan menjadi bagian dari G20 atau 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Indonesia berada di peringkat lima regional Asia Tenggara dan mempunyai nilai indeks sebesar 0,689 di bawah negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand. Peringkat Indonesia yang berada di tengah ini adalah sebuah ironi dan harus menjadi perhatian oleh pemerintah. Oleh sebab itu dibutuhkan kontribusi pemerintah baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk meningkatkan modal manusia yang kompetitif dan mampu menjadi negara dengan kategori IPM dengan level yang lebih baik sekaligus meningkatkan pembangunan ekonomi (World Bank, 2023).

Pemerintah Daerah menjadi sosok strategis terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui berbagai macam kebijakan salah satunya adalah pengeluaran pemerintah, Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberikan stimulus positif terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam kepentingan peningkatan pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah juga diharapkan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi yang direfleksikan melalui Indeks Pembangunan Manusia. Beberapa ekonom terutama kelompok Keynesian berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah dapat merangsang permintaan agregat di dalam perekonomian dan pada akhirnya memberikan rangsangan

terhadap perputaran ekonomi di daerah yang melibatkan sektor publik dan sektor privat. Pengeluaran pemerintah yang ditujukan pada fungsi tertentu dapat menciptakan multiplier ekonomi melalui agregat permintaan yang ditimbulkan. Oleh sebab itu dibutuhkan kontribusi pemerintah, salah satunya melalui alokasi pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja menurut fungsi yang tepat.

Kabupaten Maros adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah terutama pada bidang kesehatan dan pendidikan sehingga dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia yang tinggi di Kabupaten Maros. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah:

Gambar 1.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan angka IPM Kabupaten Maros pada tahun 2011 sebesar 64,95 dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022 sebesar 71,00. Selama periode 2011 hingga 2020, indeks pembangunan manusia Kabupaten Maros menunjukkan kemajuan, tetapi status pembangunan

manusia Kabupaten Maros masih pada level sedang, sedangkan selama periode 2021 hingga 2022 indeks pembangunan manusia Kabupaten Maros sudah masuk pada level tinggi meskipun masih dibawah angka IPM provinsi. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2011 sampai 2022 angka IPM provinsi lebih tinggi dibandingkan IPM Kabupaten Maros. Pada tahun 2022, angka IPM Maros mencapai 71,00, sedangkan angka IPM Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 72,82 (BPS, 2023).

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Maros dengan setiap tahun mengalami peningkatan, namun ternyata IPM Kabupaten Maros hanya mampu berada pada peringkat 10 besar diantara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada Tahun 2022, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Kota Makassar, Palopo, dan Pare-pare menempati urutan pertama, kedua dan ketiga IPM tertinggi, sedangkan Kabupaten Maros berada di urutan ke-10 dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (BPS, 2023). Oleh sebab itu dibutuhkan kontribusi pemerintah untuk meningkatkan modal manusia yang kompetitif dan mampu menjadi daerah dengan kategori IPM dengan level yang lebih baik sekaligus meningkatkan pembangunan ekonomi.

Pembangunan sumber daya manusia sudah dipandang penting oleh pemerintah Indonesia. Melalui tujuan negara yang teradapat pada alinea ke empat UUD 1945, pemerintah mengemban tugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Menurut Ritonga (2014) dalam Mongan (2019), untuk mencapai tujuan negara, pemerintah daerah melaksanakan program dan kegiatan untuk melayani masyarakat di semua bidang pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Menurut Mankiw (2018), pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Modal manusia dapat mengacu pada pendidikan, namun juga dapat digunakan untuk menjelaskan jenis investasi manusia lainnya yaitu investasi yang mendorong ke arah populasi yang sehat yaitu kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro & Smith, 2011).

Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang produktif. Dalam hal ini modal manusia dapat mengacu pada pendidikan dan juga kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan dari pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan kesejahteraan, sedangkan pendidikan merupakan hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, keduanya merupakan hal yang penting untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan (Todaro & Smith, 2011).

Pendidikan adalah modal manusia untuk dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan yang menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk

mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan yang diberikan kepada para pelajar tidak hanya pendidikan yang sebatas teori saja namun harus berdasarkan prakteknya juga, serta menanamkan pendidikan yang berdasarkan agama agar dapat mewujudkan anak bangsa yang cerdas serta berahlak baik.

Selain pendidikan, kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan kesehatan oleh pemerintah merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, sudah seharusnya pemerintah menyediakan sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktivitas pembangunan manusia. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang menetapkan suatu kebijakan tertentu memiliki konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut didanai dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran bagi pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu bidang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada bidang tersebut. Sebagai bentuk kebijakan fiskal pemerintah, setiap tahun pemerintah pusat menetapkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU-APBN) sebagai hak dan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Sementara pemerintah daerah setiap tahun menetapkan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai

dengan kebijakan pembangunan masing-masing daerah. Hal ini sesuai dengan semangat otonomi daerah yang mulai berlaku sejak diterbitkannya UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. APBN dan APBD menjadi alat utama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Aulia et al., 2023).

Pengeluaran pemerintah dapat dikelompokkan dalam dua golongan yaitu: Pengeluaran Rutin; pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintahan, yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan. Pengeluaran Pembangunan; pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik dan non fisik, yang tujuannya untuk membiayai program-program pembangunan pemerintah daerah. Tujuan dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan adalah salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan berbagai pemenuhan kebutuhan, seperti pendidikan dan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan akan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Komitmen keseriusan pemerintah terhadap pembangunan manusia terutama di bidang kesehatan dan kemudian bidang pendidikan dituangkan dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 171 mengatur alokasi belanja di bidang kesehatan sebagai sesuatu yang mutlak dipenuhi (*mandatory spending*). Pasal tersebut menyebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar sekurang-kurangnya lima persen dari APBN, sementara pemerintah provinsi dan

kabupaten/kota mengalokasikan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sepuluh persen dari APBD.

Sementara untuk bidang pendidikan, pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang amendemen pada tahun 2009, mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pengalokasian dana pendidikan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49. Alokasi dana bidang kesehatan dan bidang pendidikan sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut seharusnya tidak termasuk alokasi pembayaran gaji aparatur sipil negara yang bekerja di bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi memungkinkan dapat meningkatkan output dan pendapatan dimasa yang akan mendatang sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM ditandai dengan adanya perkembangan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi pada setiap tahunnya, meskipun mengalami keadaan yang fluktuatif. Hal ini selaras dengan peningkatan pengeluaran pemerintah total dari tahun ke tahun. Pengeluaran pemerintah di Indonesia dapat dilihat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada sisi belanja negara atau pengeluaran. Sebenarnya ada perubahan unsur pengeluaran dengan adanya desentralisasi. Sebelum desentralisasi, pengeluaran pemerintah terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Sedangkan setelah desentralisasi, pengeluaran pemerintah terdiri dari anggaran pemerintah pusat dan anggaran daerah yaitu APBD. Namun,

besarnya pengeluaran pemerintah baik sebelum maupun setelah desentralisasi masih sama tergantung proyeksi pendapatan negara.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah produk domestik bruto. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang atau jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pada prekonomian Indonesia, PDB mengalami peningkatan setiap tahunnya dan laju pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif.

Dari hasil penelitian Ramirez dkk (1998) dengan data *cross-country* (1970-1992), menemukan adanya hubungan positif yang kuat antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan terbukti pula mempunyai peran penting sebagai penghubung yang menentukan kekuatan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia, sedangkan tingkat investasi dan distribusi pendapatan adalah penguat hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Studi ini yang menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi turut memberi andil dalam memperkuat pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi (Nugroho, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, menarik diteliti mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros di Makassar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) baik langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros.
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) baik langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap IPM baik secara langsung maupun maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap IPM baik secara langsung maupun maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Maros.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan digunakan untuk:

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan mendapat gambaran tentang pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang Kesehatan dan pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Maros.
2. Bagi institusi pendidikan, dapat menjadi referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dalam aspek yang sama maupun dari pengembangan penelitian ini.

3. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam pengembalian keputusan serta sebagai bahan informasi dan referensi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan modal manusia. Modal manusia dapat mengacu pada pendidikan, namun juga digunakan untuk menjelaskan jenis investasi manusia lainnya, yaitu investasi yang mendorong ke arah populasi yang sehat yaitu kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan dari pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan kesejahteraan, sedangkan pendidikan merupakan hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, keduanya merupakan hal yang penting untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan (Todaro & Smith, 2011).

IPM adalah angka yang diolah berdasarkan tiga dimensi yaitu: Panjang usia (*longevity*), yang diukur berdasarkan angka harapan hidup saat lahir, Pengetahuan (*knowledge*), yang diukur berdasarkan angka melek huruf orang dewasa dan gabungan partisipasi sekolah di tingkat sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi (dengan pembobotan yang sama pada kedua indikator), Standar hidup (*standar of living*) suatu bangsa yang diukur oleh pendapatan riil per kapita (Harmadi & Nugroho, 2020).

Secara teknis ketiga dimensi ini dijabarkan menjadi beberapa indikator yaitu kesehatan (dan kependudukan), pendidikan, serta ekonomi. Ini berarti pembangunan manusia merupakan manifestasi dari aspirasi dan tujuan suatu bangsa yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan secara struktural melalui upaya yang sistematis. Pembangunan manusia merupakan suatu upaya untuk memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki manusia yang dapat terealisasi apabila manusia berumur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang produktif. Hal tersebut sekaligus merupakan tujuan utama dari pembangunan yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan dan kesehatan merupakan modal utama yang harus dimiliki manusia agar mampu meningkatkan potensinya. Umumnya semakin tinggi kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu.

Indikator Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) tercermin melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai *Purchasing Power Parity Indeks* (PPP) (Andaiyani, 2013). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu daerah/negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu panjang usia, pengetahuan dan standar hidup. Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup.

Ada beberapa komponen Indeks Pembangunan Manusia antara lain, yaitu:

1. Indeks Pendidikan

Perhitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya, mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka LIT), dimana LIT merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

2. Indeks Harapan Hidup

Hidup Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian pertahun, variabel tersebut diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubung dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung. Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Untuk mendapatkan Indeks harapan hidup dengan cara menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

3. Indeks Daya Beli (Indeks Pendapatan)

Kemampuan daya beli penduduk atau *Purchasing Power Parity* (PPP) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat dalam menghitung indeks pembangunan manusia. Kemampuan daya beli ini lebih mencerminkan kemampuan masyarakat secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya, dan sangat jauh berbeda dengan PDRB perkapita atau yang dikenal dengan pendapatan perkapita. Untuk mengukur standar hidup, data PDRB perkapita tidak dapat digunakan karena bukan ukuran yang peka untuk kemampuan daya beli penduduk. Oleh sebab itu, perhitungan daya beli penduduk menggunakan konsumsi perkapita yang kemudian disesuaikan (BPS, 2023).

Merujuk pada ketiga indikator indeks pembangunan manusia, maka angka indeks pembangunan manusia dapat dihitung dengan menggunakan rumus (BPS, 2023):

$$IPM = 1/3 \times (IPD \times IHH \times IP)$$

Keterangan:

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

IPD : Indeks Pendidikan

IHH : Indeks Harapan Hidup

IP : Indeks Pendapatan/Daya Beli

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah kondisi dimana meningkatnya pendapatan karena terjadi peningkatan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan

ekonomi juga merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Oftaviani et al., 2022).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah, tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksinya, apakah milik penduduk wilayah tersebut ataukah milik penduduk wilayah lain (Sukirno 1994:105). PDRB adalah salah satu indikator yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi yang biasanya juga digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu dan menjadi tolak ukur dalam menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang (Laisina et al., 2015).

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut pandangan ahli ekonomi klasik ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok

barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta teknologi yang digunakan. Kaum klasik berpendapat bahwa bertambahnya alat-alat modal yang terdapat dalam masyarakat akan dengan sendirinya menciptakan pertambahan produksi nasional dan pembangunan ekonomi, karena keyakinan itu kaum klasik tidak memberikan perhatian kepada fungsi pembentukan modal dalam perekonomian, yaitu untuk mempertinggi tingkat pengeluaran masyarakat (Adisasmita, 2013).

Teori pertumbuhan ekonomi klasik, dikemukakan suatu teori yang menjelaskan perkaitan antar pendapatan perkapita dan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori penduduk optimum. Teori pertumbuhan klasik dapat dilihat apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marjinal yaitu lebih tinggi daripada pendapatan perkapita. Oleh sebab itu apabila penduduk semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang maka dapat mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marjinal akan mulai mengalami penurunan. Maka dari itu pendapatan nasional dan pendapatan perkapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya (Sukirno, 2011).

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes

Teori Keynesian didasarkan atas hipotesis siklus arus uang, yaitu mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian akan meningkatkan pendapatan, yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya belanja dan pendapatan. Konsumsi (pengeluaran) yang dilakukan oleh satu orang akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama, sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain.

Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal (Sandi & Amanah, 2019).

3. Teori Schumpeter

Teori ini menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Para pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barangbaru mempertinggi cara efisien cara memproduksi dalam menghasilkan suatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan (Hendrayanti & Nafi'ah, 2023).

2.1.3 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah pembelanjaan barang-barang modal, barang konsumsi dan jasa-jasa. Pengeluaran pemerintah merupakan penggunaan uang dan sumber daya suatu Negara untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Negara atau pemerintah guna mewujudkan fungsinya dalam menciptakan kesejahteraan. Pengeluaran pemerintah di Indonesia selain menjadi sumber pembiayaan bagi program-program sosial, juga berperan besar dalam meningkatkan dan mempertahankan pengeluaran agregat serta pertumbuhan ekonomi. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut berasal dari penerimaan dalam negeri. Sedangkan pengeluaran pemerintah daerah dibiayai oleh pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dan pemerintah pusat (Pujoalwanto, 2014).

Kebijakan pemerintah untuk belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas manusia dalam bentuk pelayanan masyarakat. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Prioritas kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melihat mutu manusia dari sisi lain yaitu dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, atau pun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang. Oleh karena itu, diperlukan anggaran khusus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pengeluaran pemerintah indikator harapan hidup (indeks kesehatan).

Sesuai dengan UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pasal 170 ayat 1 pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil yang berguna untuk terjaminnya pembangunan kesehatan agar meningkatnya derajat kesehatan yang tinggi. Dan anggaran kesehatan pada pasal 171 ayat 1, besaran anggaran kesehatan pemerintah 5% dari APBN di luar gaji. Untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji.

2. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang wajib disediakan oleh pemerintah. Menurut Michael P. Todaro, produktifitas suatu negara dapat meningkat jika pemerintah dapat memenuhi salah satu kebutuhan dasar masyarakatnya, dalam hal ini yaitu pendidikan. Michael P. Todaro juga menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memberikan kontribusi kepada indeks pembangunan manusia yaitu modal manusia.

Pengeluaran pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan. Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam pembangunan nasional.

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Hal ini diamankan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31. Dalam pasal tersebut juga dibahas tentang kewajiban negara dalam menjamin ketersediaan bagi setiap warga negaranya (BPS, 2023). Pada saat ini, pemerintah menganggarkan

pendidikan minimal 20% dari APBN. Hal ini tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2003 Pasal 49 ayat 1 yang menyebutkan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah di bidang Kesehatan dengan Indeks Pembangunan Manusia

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, kesehatan juga dapat dilihat dari sebagai komponen pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang vital sebagai input produksi agregat, peran gandanya sebagai input produksi agregat, peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi (Todaro & Smith, 2011). Schultz berpendapat bahwa apakah kesehatan yang buruk memiliki dampak pada total faktor produktivitas, yang juga terkait dengan tingkat output suatu negara. Jika kesehatan seseorang tidak cukup baik untuk bekerja, maka, orang ini keluar dari angkatan kerja. Ini akan memiliki refleksi akhir pada pertumbuhan ekonomi. Jika orang mulai tidak bekerja karena kondisi kesehatan mereka, akan ada penurunan dramatis dalam tingkat output, yang juga menunjukkan hubungan yang kuat antara kesehatan dan pertumbuhan. Dapat

dianggap bahwa kesehatan adalah indikator penting untuk produktivitas (Erçelik, 2018).

Todaro & Smith (2011), mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat. Hubungan Kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan bidang kesehatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya diharapkan bisa memberi manfaat positif bagi meningkatnya angka harapan hidup (Sharpe, 2007). Bidang kesehatan juga merupakan salah satu bagian penting dalam 28 upaya pembangunan kualitas sumberdaya manusia. Kebutuhan seluruh lapisan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ini pada dasarnya merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Todaro & Smith, 2003, bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat (Kahang et al., 2016).

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan digunakan untuk melihat capaiannya terhadap dimesi IPM yang pertama, yaitu hidup sehat dan umur panjang. Contoh dari pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan adalah peningkatan nutrisi ibu hamil dan menyusui, peningkatan layanan JKN (Jaminan Kesehatan Negara) seperti kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-Kesehatan), pembangunan rumah sakit dan pendorongan pola hidup sehat. Ketika akses terhadap kesehatan, seperti JKN (Jaminan Kesehatan Negara), sudah

terpenuhi oleh subsidi pemerintah maka akan mampu membuat setiap individunya hidup layak dan umur panjang sesuai dengan dimensi pertama IPM.

2.2.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah di bidang Pendidikan dengan Indeks Pembangunan Manusia

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan digunakan sebagai indikator yang dapat mencapai dimensi IPM yang kedua, yaitu dimensi pengetahuan (wawasan) dan lamanya sekolah. Contoh dari pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan adalah bantuan operasional sekolah, tunjangan profesi guru, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional museum, dan bantuan operasional pembangunan GOR (Gelanggang Olahraga). Ketika masyarakat mendapatkan bantuan operasional sekolah, sebagai contohnya wajib belajar 9 tahun, maka hal tersebut akan mengakibatkan suatu individu mempunyai wawasan pengetahuan dan lamanya bersekolah sesuai dengan dimensi IPM yang kedua.

Belanja pendidikan merujuk pada alokasi dana yang dikeluarkan oleh pemerintah atau individu untuk mendukung sektor pendidikan. Pendidikan memainkan peran kunci dalam meningkatkan kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia, serta merangsang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Melalui investasi dalam pendidikan, suatu masyarakat dapat meningkatkan tingkat literasi, pengetahuan, dan keterampilan, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif terhadap indeks Pembangunan Manusia. Dengan adanya belanja pada bidang pendidikan yang memadai, suatu negara dapat meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan layanan. Sementara itu, belanja bantuan sosial mencakup program-program yang dirancang untuk memberikan dukungan finansial kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini, tingkat

pembangunan manusia yang tinggi akan relatif mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui keterampilan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Penambahan daya beli masyarakat akan mempengaruhi stabilitas sosial (Harsono et al., 2024).

Tingginya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Winarti, 2014).

Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara tetapi tidak didasari oleh suatu teori tertentu. Selain tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan. Pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan kapasitas dan kemerdekaan hidup yang dinamakan manfaat intrinsik. Menurut Lanjouw, dkk, Pendidikan dan kesehatan berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi yang dinamakan manfaat instrumental. Pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan yang

baik, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi teknologi menjadi mungkin untuk terjadi. Seperti diungkapkan oleh Meier dan Rauch dikatakan pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan (Laisina et al., 2015).

2.2.3 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (1996) hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) kriteria, yaitu seimbang (*balanced*) dan tidak seimbang (*unbalanced*). Untuk yang seimbang dibedakan lagi antara kuat dan lemah. Kategori seimbang yang pertama, terjadi hubungan kuat (*strong link*) antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. Sementara kategori seimbang yang kedua, berlangsung hubungan lemah (*weak link*) antar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Kategori tidak seimbang (*unbalanced link*) memiliki ciri pertumbuhan ekonomi relatif lambat tetapi pembangunan manusia relatif cepat atau sebaliknya.

Pembangunan ekonomi hakekatnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan berkaitan antar sektor produksi sehingga dengan terciptanya pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan dan pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Proses pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah aktifitas ekonomi yang mengupayakan pengoptimalan penggunaan faktor-faktor ekonomi yang tersedia untuk menciptakan nilai tambah dan komponen utama dari faktor produksi adalah tenaga kerja termasuk juga kualitas tenaga kerja. Sedangkan konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks gabungan dihitung sebagai rata-rata sederhana dari ketiga indeks menggambarkan kemampuan dasar manusia untuk

mengembangkan pilihannya, yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup (Nasyri et al., 2024).

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, fokus utama pembangunan tidak cukup hanya pembangunan ekonomi semata, tetapi lebih diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia. Model pembangunan yang dianut Indonesia sebelumnya lebih memfokuskan pada penambahan modal fisik. Strategi tersebut ternyata menyebabkan adanya kepincangan dalam distribusi pendapatan. Selain pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia sangatlah penting dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan. Hal ini karena pendidikan dan kesehatan yang baik memungkinkan penduduk miskin untuk meningkatkan nilai asetnya mengingat aset terpenting mereka adalah tenaga mereka. Sehubungan dengan itulah maka investasi pada pendidikan dan kesehatan sangat penting artinya bagi pengurangan kemiskinan. Hal ini selaras dengan hasil Konferensi Tingkat Tinggi pemimpin dunia pada tahun 2000 yang telah menyepakati apa yang disebut dengan tujuan pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals-MDGs*). Pembangunan akan menempatkan pembangunan manusia sebagai kunci untuk mencapai pengembangan sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Raharti et al., 2020).

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia mempunyai pengaruh yang saling ketergantungan dan saling berkontribusi. UNDP mengungkapkan bahwa pembangunan manusia dapat berkelanjutan jika didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Meskipun tidak secara otomatis memiliki hubungan, tetapi jika keduanya bersatu dalam kebijakan pembangunan satu arah, maka dapat menciptakan kekuatan yang dapat saling mendorong (Nasyri et al., 2024).

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Arfiyansyah & Khusaini (2018), telah menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus pemerintah daerah tingkat provinsi dengan tingkat IPM tinggi, sedang, dan rendah. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah PDRB perkapita dan IPM, sementara variabel independen melibatkan pengeluaran pemerintah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia melalui PDRB perkapita. Temuan ini memberikan wawasan penting mengenai peran pengeluaran pemerintah dalam mendorong perkembangan manusia melalui aspek ekonomi di berbagai tingkat provinsi di Indonesia.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tjodi et al., (2018), dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi di Provinsi Sulawesi Utara)”. Variabel dependen yang diteliti meliputi Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan variabel independen mencakup Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, dan Belanja Modal. Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sub-struktur 1, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara pengeluaran di sektor kesehatan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini memberikan

wawasan penting tentang dampak kebijakan pengeluaran pemerintah dalam sektor-sektor tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahendra (2020), dengan judul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan, Inflasi dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating di Indonesia”. Variabel dependen yang diteliti adalah Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia. Sementara itu, variabel independen melibatkan Pengeluaran Pemerintah, Inflasi, dan Kemiskinan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, sementara variabel Kemiskinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tersebut. Penemuan ini memberikan pemahaman penting tentang faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dengan pertimbangan inflasi sebagai variabel moderasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sutarno et al., (2021), dengan judul “Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi” telah menjelajahi hubungan antara variabel Belanja Daerah sebagai variabel independen dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis jalur dengan regresi data panel digunakan sebagai metode analisis. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia.

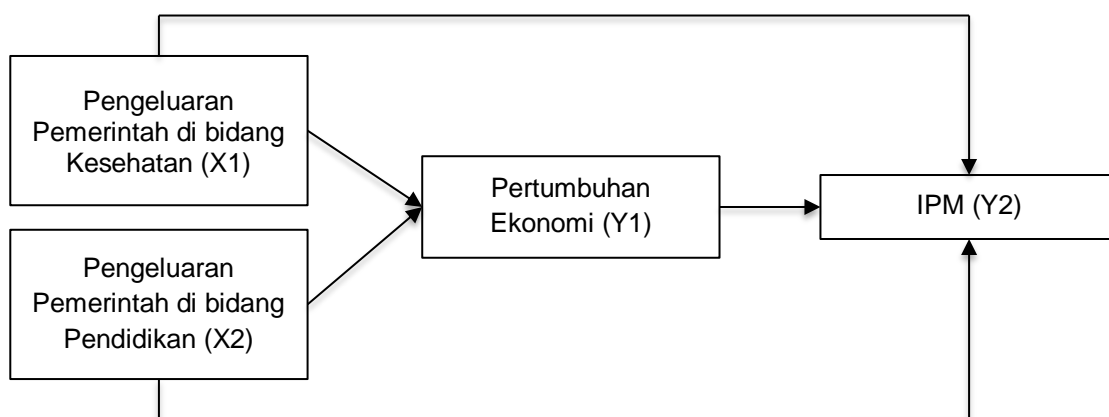
Penelitian yang dilakukan oleh Laisina et al., (2015), mengenai “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap PDRB melalui Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara tahun 2002-2013” telah menganalisis variabel dependen yang mencakup Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sementara variabel independen adalah Pengeluaran Pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur (*Path Analysis*). Hasil penelitian ini mengungkap bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh yang positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sementara pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Selain itu, pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia bersifat positif, sementara di sektor kesehatan bersifat negatif. Temuan ini memberikan wawasan penting mengenai dampak kebijakan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap aspek-aspek pembangunan di Sulawesi Utara.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir penelitian ini didasarkan pada landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan sebelumnya. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang kuat antara pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia, serta keterkaitan antara pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan, terhadap peningkatan IPM melalui pertumbuhan ekonomi. Peningkatan Pengeluaran pemerintah pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan tingkat pendapatan masyarakat,

yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya akan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka peneliti mencoba untuk mengembangkan sebuah model penelitian. Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan dan untuk memperjelas kerangka pikir penelitian, maka hubungan-hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Pada Gambar 2.1 menunjukkan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan diyakini berdampak positif terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pengeluaran kesehatan akan berdampak terhadap peningkatan angka harapan hidup dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kapasitas dan kualitas kerja masyarakat. Kondisi tersebut pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan diyakini berdampak positif terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pengeluaran pendidikan akan berdampak terhadap peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan pada gilirannya akan berdampak pada

peningkatan kualitas pendidikan sehingga pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat juga ikut mengalami peningkatan. Kondisi tersebut akan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir penelitian pada Gambar 2.1 maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan mempunyai pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia baik langsung maupun tidak langsung melalui Pertumbuhan Ekonomi.
2. Diduga Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan mempunyai pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia baik langsung maupun tidak langsung melalui Pertumbuhan Ekonomi.